


Analisis Konsep Keseimbangan Umum dan Dampak Perubahan Harga Sektor Energi terhadap Pasar Komoditas Utama

Jensita Pasaribu^{1*}, Melani Putri D. Siregar², Sri Ratna Hastuti Sitanggang³, Grace Marturia Lumban Gaol⁴

¹⁻⁴Pendidikan Ekonomi, Fakkultas Ekonomi, Univesitas Negeri Medan, Jl. Willem Iskandar Pasar V, Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
E-mail: Jensitapasaribuoke@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7281>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 05 June 2026

Revised: 22 June 2026

Accepted: 04 July 2026

Kata Kunci:

Keseimbangan Umum,
Harga Energi,
Komoditas Utama,
Ekonomi Kesejahteraan,
Kebijakan Publik.

Keywords:

General Equilibrium,
Energy Prices, Major
Commodities, Welfare
Economics, Public
Policy.

ABSTRACT

Perubahan harga pada sektor energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM), memiliki pengaruh yang luas terhadap berbagai sektor ekonomi karena adanya keterkaitan antar pasar dalam suatu perekonomian. Kenaikan harga energi dapat meningkatkan biaya produksi, mendorong inflasi, memengaruhi harga komoditas utama, serta berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep Keseimbangan Umum (General Equilibrium) dan dampak perubahan harga sektor energi terhadap pasar komoditas utama dalam perspektif Ekonomi Kesejahteraan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur (library research), yaitu mengkaji berbagai teori, hasil penelitian terdahulu, serta data dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan harga energi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai pasar yang saling terhubung, terutama pada sektor pangan dan komoditas utama. Kenaikan harga energi menyebabkan meningkatnya biaya produksi dan distribusi sehingga harga komoditas ikut mengalami kenaikan dan daya beli masyarakat menurun. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa kebijakan subsidi energi dan bantuan sosial memiliki peran penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah.

Changes in energy sector prices, particularly fuel prices, have a broad impact on various economic sectors due to the interconnection among markets within an economy. Increases in energy prices can raise production costs, trigger inflation, affect the prices of major commodities, and influence public welfare. This study aims to analyze the concept of General Equilibrium and the impact of changes in energy prices on major commodity markets from the perspective of Welfare Economics. The research employs a descriptive qualitative method using a literature study approach by reviewing theories, previous studies, and relevant documents related to the research topic. The findings indicate that changes in energy prices create a chain effect across interconnected markets, especially in the food and major commodity sectors. Rising energy prices lead to higher production and distribution costs, resulting in increased commodity prices and reduced purchasing power among consumers. Furthermore, the study reveals that energy subsidy policies and social assistance programs play an important role in maintaining public welfare, particularly for low-income groups.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Jensita Pasaribu M, et al (2026). Analisis Konsep Keseimbangan Umum dan Dampak Perubahan Harga Sektor Energi terhadap Pasar Komoditas Utama, 5(1) 374-380. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7281>

PENDAHULUAN

Perekonomian suatu negara pada hakikatnya merupakan sebuah ekosistem yang terintegrasi, di mana aktivitas antar-sektor tidak pernah berjalan secara terisolasi. Setiap perubahan regulasi atau

guncangan ekonomi yang terjadi pada satu pasar spesifik akan merambat, menciptakan efek penyebaran (spillover effect), dan memengaruhi sektor-sektor lainnya secara bersamaan. Fenomena keterkaitan sistemik ini menjadi basis utama dari Teori Keseimbangan Umum (General Equilibrium). Teori ini menjelaskan bahwa seluruh pasar dalam suatu perekonomian mulai dari pasar barang, pasar faktor produksi, tenaga kerja, hingga pasar modal saling terhubung dan bergerak bersama dalam satu kesatuan sistem yang utuh. Dalam kerangka ini, harga berfungsi sebagai mekanisme penyesuaian otomatis sekaligus instrumen koordinasi yang menyelaraskan keputusan antara konsumen dan produsen guna mencapai alokasi sumber daya yang efisien secara simultan.

Salah satu bentuk guncangan (shock) yang paling signifikan pengaruhnya dalam stabilitas perekonomian kontemporer adalah fluktuasi harga di sektor energi. Sebagai komoditas strategis yang menjadi input primer bagi hampir seluruh aktivitas ekonomi, perubahan harga energi (seperti bahan bakar minyak dan gas) secara otomatis memicu transmisi harga yang luas. Kenaikan harga BBM, misalnya, tidak sekadar dibebankan kepada konsumen kendaraan bermotor, melainkan langsung mengerek biaya transportasi logistik serta biaya produksi pada sektor pertanian dan pengolahan pangan. Efek domino ini pada akhirnya memaksa harga komoditas pangan utama di pasar ikut melonjak naik. Rangkaian kenaikan harga barang pokok tersebut secara riil menggerus daya beli masyarakat, terutama kelompok rumah tangga berpendapatan rendah yang mengalokasikan mayoritas anggarannya untuk konsumsi pangan dasar dan mobilitas harian.

Tingginya kerentanan masyarakat terhadap guncangan harga ini mempertegas relevansi Teori Ekonomi Kesejahteraan (Welfare Economics) dalam mengevaluasi hasil akhir dari mekanisme pasar. Ekonomi kesejahteraan tidak hanya mengkaji aspek efisiensi alokatif semata, tetapi juga menekankan pentingnya keadilan distribusi (equity) manfaat pembangunan ekonomi di antara berbagai lapisan masyarakat. Pilar utama dari teori ini, yaitu Efisiensi Pareto (Pareto Efficiency), menegaskan bahwa suatu kondisi alokasi dikatakan optimal jika kesejahteraan seorang individu tidak dapat ditingkatkan lagi tanpa menyebabkan penurunan kesejahteraan individu lainnya. Namun, dalam realitas empiris, pencapaian kondisi ideal Pareto ini kerap terdistorsi oleh adanya guncangan harga energi yang berdampak asimetris, di mana beban ekonomi terbesar harus ditanggung secara tidak proporsional oleh kelompok miskin dan pelaku usaha mikro.

Pemerintah Indonesia telah melakukan intervensi kebijakan fiskal secara masif untuk memitigasi dampak guncangan ini melalui dua instrumen utama, yaitu belanja subsidi energi serta penyaluran berbagai program jaring pengaman sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Program Sembako. Instrumen-instrumen ini ditujukan untuk meredam gejolak inflasi, menstabilkan harga komoditas pasar, serta melindungi daya beli masyarakat rentan. Kendati demikian, efektivitas dari implementasi program-program tersebut sangat bergantung pada derajat ketepatan sasaran data penerima serta efisiensi mekanisme distribusinya. Subsidi harga yang bersifat umum dan massal sering kali memicu inefisiensi anggaran fiskal dan distorsi pasar. Di sisi lain, bantuan sosial yang diwarnai oleh ketidakakuratan data berisiko menciptakan exclusion dan inclusion error, sehingga bantuan tidak tersampaikan kepada kelompok yang paling membutuhkan.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah kajian komprehensif yang mampu memetakan secara utuh bagaimana mekanisme keseimbangan umum bekerja ketika terjadi guncangan harga sektor energi, sejauh mana kondisi efisiensi Pareto dapat dipertahankan, serta bagaimana formula kebijakan subsidi dan bantuan sosial seharusnya dirancang agar mampu menghasilkan output yang efisien sekaligus berkeadilan sosial. Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, artikel ilmiah ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan (library research). Kajian ini mengintegrasikan fondasi konseptual Teori Keseimbangan Umum dan Ekonomi Kesejahteraan dengan draf hasil temuan empiris terdahulu guna menganalisis dampak sistemik perubahan harga energi terhadap pasar komoditas utama serta merumuskan implikasi strategis bagi perbaikan program jaring pengaman sosial di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) dan analisis data sekunder, yang dilaksanakan selama dua bulan (April–Mei 2026) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Medan. Menurut Creswell (2013), penelitian kualitatif

adalah pendekatan sistematis yang bertujuan untuk memahami, menggambarkan, dan menganalisis fenomena secara mendalam melalui interpretasi data yang bersifat non-numerik. Adapun Sugiyono (2017) menyatakan bahwa studi pustaka atau studi literatur adalah kajian teoritis, referensi, serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dipilih karena penelitian ini bersifat analitis-konseptual yang bertumpu pada telaah teori, konsep, dan temuan-temuan penelitian terdahulu. Melalui pendekatan ini, peneliti melakukan identifikasi, pengkajian, dan sintesis terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan untuk membangun argumentasi komprehensif mengenai mekanisme keseimbangan umum, efisiensi Pareto, dan efektivitas kebijakan subsidi serta bantuan sosial pemerintah Indonesia.

Sumber Data

Penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder. Sumber data dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, sumber primer, yang mencakup karya-karya orisinal Leon Walras dan Arrow-Debreu sebagai landasan Teori Keseimbangan Umum, tulisan Arthur C. Pigou dalam *The Economics of Welfare* sebagai dasar Ekonomi Kesejahteraan, serta regulasi dan dokumen kebijakan resmi pemerintah Indonesia seperti Undang-Undang APBN dan peraturan terkait subsidi BBM, PKH, BPNT, dan BLT. Kedua, sumber sekunder, yang meliputi artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku teks ekonomi mikro dan ekonomi kesejahteraan, serta laporan resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Bank Dunia, dan IMF yang memuat data terkait inflasi, harga komoditas, realisasi subsidi, dan cakupan bantuan sosial di Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur dan studi dokumentasi. Studi literatur digunakan untuk mengkaji teori, referensi, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan, sementara metode dokumentasi digunakan untuk menelusuri data historis dan kebijakan dari dokumen resmi lembaga pemerintah dan organisasi internasional. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahap: (1) perumusan kata kunci yang relevan, seperti *general equilibrium*, *Pareto efficiency*, *energy price shock*, *subsidi BBM Indonesia*, dan *bantuan sosial*; (2) penelusuran literatur melalui platform akademik seperti Google Scholar, JSTOR, Sinta, dan Garuda; (3) seleksi sumber berdasarkan relevansi, kebaruan, dan kredibilitas; serta (4) klasifikasi data sesuai tema bahasan. Kedua teknik ini dipilih untuk memastikan data yang dikumpulkan sesuai dengan prosedur ilmiah dan berbasis bukti empiris yang kuat.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahapan utama. Pertama, reduksi data, yakni memilah dan memfokuskan informasi dari berbagai sumber literatur dengan mempertahankan informasi yang relevan dengan pertanyaan penelitian sambil menyederhanakan data yang berulang. Kedua, penyajian data, di mana data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian naratif yang terstruktur secara tematik, mencakup: (a) mekanisme keseimbangan umum dalam keterkaitan antar pasar; (b) penggunaan efisiensi Pareto sebagai alat penilaian kesejahteraan; dan (c) evaluasi kebijakan subsidi dan bantuan sosial pemerintah Indonesia. Ketiga, penarikan kesimpulan secara deduktif, yakni dengan mengaplikasikan kerangka teori keseimbangan umum dan ekonomi kesejahteraan untuk menjelaskan dan mengevaluasi fenomena kebijakan energi di Indonesia.

Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengonfirmasi temuan dari satu sumber literatur dengan sumber-sumber lain yang membahas topik serupa. Selain itu, peneliti memprioritaskan literatur yang telah melalui proses peer review serta dokumen resmi dari instansi pemerintah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan studi kepustakaan terhadap berbagai buku teks ekonomi mikro, jurnal ilmiah, dan laporan resmi pemerintah, ditemukan bahwa perubahan harga energi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keseimbangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Energi merupakan input penting dalam kegiatan produksi dan distribusi sehingga perubahan harganya memengaruhi harga komoditas utama, inflasi, daya beli masyarakat, dan distribusi pendapatan. Selain itu, berbagai literatur

menunjukkan bahwa kebijakan subsidi dan bantuan sosial memiliki peran penting dalam mengurangi dampak negatif kenaikan harga energi, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Berdasarkan temuan tersebut, pembahasan difokuskan pada beberapa aspek berikut.

Dampak Perubahan Harga Energi terhadap Keseimbangan Umum Perekonomian

Teori Keseimbangan Umum menjelaskan bahwa seluruh pasar dalam perekonomian saling berhubungan melalui mekanisme harga. Oleh karena itu, perubahan harga energi tidak hanya memengaruhi sektor energi, tetapi juga sektor produksi, distribusi, dan konsumsi. Kenaikan harga energi meningkatkan biaya produksi dan distribusi sehingga mendorong kenaikan harga berbagai barang dan jasa.

Hasil studi literatur menunjukkan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) meningkatkan biaya transportasi dan logistik yang pada akhirnya menyebabkan kenaikan harga barang di tingkat konsumen. Fenomena ini menunjukkan adanya transmisi harga dari sektor energi ke sektor lainnya yang menjadi karakteristik utama dalam teori keseimbangan umum.

Sektor pangan merupakan salah satu sektor yang paling sensitif terhadap perubahan harga energi. Penggunaan bahan bakar dalam proses produksi, pengolahan, dan distribusi menyebabkan kenaikan harga energi berdampak langsung pada peningkatan biaya produksi pangan. Akibatnya, harga berbagai komoditas pokok seperti beras, jagung, minyak goreng, dan telur mengalami kenaikan. Penelitian Hanna dan Nirmala (2025) menunjukkan bahwa fluktuasi harga energi memiliki hubungan yang signifikan terhadap pergerakan harga pangan dan inflasi di Indonesia.

Kenaikan harga pangan kemudian memengaruhi perilaku konsumsi masyarakat. Rumah tangga cenderung mengurangi konsumsi barang dan jasa non-primer untuk mempertahankan kebutuhan dasar sehingga permintaan agregat dapat menurun. Di sisi lain, dunia usaha menghadapi peningkatan biaya produksi yang mendorong penyesuaian harga, kapasitas produksi, maupun investasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan harga energi memiliki dampak multisektoral terhadap perekonomian.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Hutaeruk et al. (2025) yang menyatakan bahwa model keseimbangan umum mampu menjelaskan efek berantai yang ditimbulkan oleh perubahan pada satu sektor ekonomi terhadap sektor lainnya. Dengan demikian, Teori Keseimbangan Umum menjadi pendekatan yang relevan untuk menganalisis dampak perubahan harga energi terhadap perekonomian Indonesia.

Dampak Kenaikan Harga Energi terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Dalam perspektif Ekonomi Kesejahteraan, kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari tingkat pendapatan, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan hidup, mengakses pendidikan dan kesehatan, serta menikmati standar hidup yang layak. Oleh karena itu, perubahan harga energi dapat memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

Hasil studi literatur menunjukkan bahwa kenaikan harga energi menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. Meningkatnya biaya transportasi dan distribusi mendorong kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok sehingga kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa menjadi berkurang. Dampak ini lebih besar dirasakan oleh kelompok masyarakat miskin dan rentan karena sebagian besar pendapatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Kenaikan harga kebutuhan pokok juga dapat menurunkan kualitas konsumsi rumah tangga dan dalam jangka panjang berpotensi memengaruhi kesehatan, pendidikan, serta produktivitas masyarakat. Menurut Giarti dan Susilowati (2024), kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh peningkatan kualitas hidup yang tercermin melalui akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi.

Selain menurunkan kesejahteraan, kenaikan harga energi juga berpotensi memperbesar ketimpangan pendapatan. Kelompok berpendapatan tinggi umumnya memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyesuaikan diri terhadap kenaikan harga dibandingkan kelompok berpendapatan rendah. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan intervensi melalui berbagai kebijakan perlindungan sosial.

Penelitian Miracantika dan Wirantari (2024) menunjukkan bahwa program bantuan sosial berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan beban pengeluaran rumah tangga. Dengan demikian, kenaikan harga energi tidak hanya berdampak pada aktivitas ekonomi, tetapi juga memengaruhi kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat.

Efisiensi Pareto dalam Evaluasi Kebijakan Subsidi dan Bantuan Sosial

Efisiensi Pareto merupakan kondisi ketika kesejahteraan seseorang tidak dapat ditingkatkan tanpa mengurangi kesejahteraan pihak lain. Dalam kebijakan publik, konsep ini digunakan untuk menilai efektivitas alokasi sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil studi literatur menunjukkan bahwa kenaikan harga energi menyebabkan peningkatan harga berbagai komoditas akibat naiknya biaya produksi dan distribusi. Meskipun kondisi tersebut merupakan bentuk penyesuaian pasar, dampaknya lebih besar dirasakan oleh kelompok berpendapatan rendah. Oleh karena itu, intervensi pemerintah diperlukan untuk mengurangi beban ekonomi yang ditimbulkan.

Subsidi energi mampu menjaga stabilitas harga dalam jangka pendek, tetapi sering kali kurang tepat sasaran karena sebagian manfaatnya diterima oleh kelompok berpendapatan menengah dan tinggi. Penelitian Gobel et al. (2023) menunjukkan bahwa subsidi energi yang bersifat universal berpotensi menimbulkan inefisiensi fiskal. Karena itu, berbagai kajian merekomendasikan bantuan yang lebih terarah kepada rumah tangga miskin dan rentan.

Program seperti PKH, BPNT, BLT, dan Program Sembako dinilai lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan karena manfaatnya dapat diterima langsung oleh kelompok sasaran. Namun, efektivitas program tetap bergantung pada kualitas data penerima dan sistem distribusi yang digunakan. Dengan demikian, pencapaian efisiensi ekonomi dan keadilan sosial memerlukan kebijakan yang tepat sasaran serta implementasi yang baik.

Peran Bantuan Sosial dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi dan Mengurangi Kemiskinan

Bantuan sosial merupakan instrumen penting untuk melindungi kelompok masyarakat rentan dari dampak guncangan ekonomi, termasuk kenaikan harga energi. Hasil studi literatur menunjukkan bahwa bantuan sosial membantu menjaga daya beli masyarakat sehingga kebutuhan dasar tetap dapat terpenuhi.

Program bantuan sosial seperti PKH, BPNT, BLT, dan Program Sembako memberikan kontribusi dalam mengurangi kemiskinan dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Penelitian Salsabila et al. (2024) menunjukkan bahwa bantuan sosial berpengaruh positif terhadap pengentasan kemiskinan, sedangkan Miracantika dan Wirantari (2024) menegaskan bahwa efektivitas program sangat dipengaruhi oleh ketepatan sasaran dan kualitas data penerima manfaat.

Dalam perspektif Teori Keseimbangan Umum, bantuan sosial juga membantu mempertahankan tingkat konsumsi masyarakat sehingga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Namun, berbagai tantangan seperti ketidaktepatan sasaran dan keterlambatan distribusi masih perlu diperbaiki agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal.

Secara keseluruhan, bantuan sosial berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mengurangi kemiskinan, terutama ketika terjadi kenaikan harga energi.

Implikasi Kebijakan bagi Pemerintah Indonesia

Hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan harga energi memiliki dampak luas terhadap produksi, distribusi, konsumsi, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan dampak lintas sektor dalam setiap kebijakan energi yang diterapkan.

Subsidi energi yang bersifat universal cenderung kurang efisien karena manfaatnya tidak sepenuhnya diterima oleh kelompok yang membutuhkan. Sebaliknya, bantuan sosial yang lebih terarah dinilai lebih efektif dalam melindungi masyarakat rentan sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal.

Selain itu, pemerintah perlu memperkuat ketahanan energi melalui diversifikasi sumber energi dan pengembangan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Di sisi lain, perbaikan sistem pendataan dan penyaluran bantuan sosial juga perlu dilakukan agar kebijakan perlindungan sosial menjadi lebih tepat sasaran.

Dengan demikian, kebijakan yang mengintegrasikan stabilitas harga energi, perlindungan sosial, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan menjadi langkah penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur mengenai penerapan Teori Keseimbangan Umum dan Ekonomi Kesejahteraan dalam menganalisis dampak perubahan harga energi terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa perubahan harga energi memiliki pengaruh yang luas terhadap perekonomian. Kenaikan harga energi tidak hanya meningkatkan biaya produksi dan distribusi, tetapi

juga memengaruhi harga komoditas pangan, tingkat inflasi, pola konsumsi masyarakat, serta keseimbangan antara permintaan dan penawaran di berbagai sektor ekonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa pasar energi memiliki keterkaitan yang erat dengan sektor-sektor ekonomi lainnya sebagaimana dijelaskan dalam Teori Keseimbangan Umum.

Dari perspektif Ekonomi Kesejahteraan, kenaikan harga energi berdampak pada penurunan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah yang lebih rentan terhadap perubahan harga kebutuhan pokok. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kerentanan ekonomi, memperlebar ketimpangan pendapatan, dan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kelompok rentan menjadi aspek penting dalam menjaga kesejahteraan sosial di tengah gejolak harga energi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kebijakan subsidi dan bantuan sosial memiliki peran strategis dalam mengurangi dampak negatif kenaikan harga energi. Meskipun subsidi energi dapat membantu menjaga stabilitas harga dalam jangka pendek, efektivitasnya sering kali terbatas karena belum sepenuhnya tepat sasaran. Sebaliknya, bantuan sosial yang terarah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Program Sembako dinilai lebih efektif dalam melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan serta mendukung pemerataan kesejahteraan.

Selain berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial, bantuan sosial juga berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui peningkatan konsumsi rumah tangga yang mendorong aktivitas produksi dan perdagangan. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada ketepatan sasaran, kualitas data penerima manfaat, transparansi penyaluran, serta efektivitas pengawasan dan evaluasi program.

Dengan demikian, pemerintah Indonesia perlu menerapkan kebijakan yang mampu menyeimbangkan efisiensi ekonomi, keberlanjutan fiskal, dan pemerataan kesejahteraan. Integrasi antara kebijakan energi, perlindungan sosial, dan stabilitas ekonomi menjadi langkah penting untuk meminimalkan dampak negatif perubahan harga energi sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Alfath, N. D., Andiny, P., Rizal, Y., & Safuridar. (2024). Pengaruh belanja bantuan sosial dan subsidi terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 3(1), 13–23.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Laporan ketimpangan dan distribusi pendapatan Indonesia. BPS RI.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications, Inc.
- Dosinta, N. F., Djafar, F., & Yantiana, N. (2024). The role of public expenditures on community welfare in Indonesia. *Jurnal Economia*, 20(2), 1–15.
- Giarti, Q. N., & Susilowati, D. (2024). Analisis kesejahteraan masyarakat di Indonesia berdasarkan indikator pembangunan manusia. *Jurnal Ekuilnemi*, 6(2), 240–252.
- Hasan, R. (2025). Dinamika konsep welfare state di Indonesia: Antara konstitusi dan implementasi kebijakan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10), 1–12.
- Abrar, M., & Mukhlash. (2024). Teknik pengumpulan data penelitian kualitatif: Suatu pengantar. [cite_start]UNJA Publisher.
- Hanna, R. H., & Nirmala, T. (2025). Food-energy price dynamics: Analisis pengaruh fluktuasi harga komoditas pangan dan harga energi terhadap inflasi di Indonesia 2014–2024. *Indonesian Journal of Economy, Business, Entrepreneurship and Finance*, 6(1).
- Hutauruk, E. T. R., Batubara, N. I. A., Fadilah, T. A., & Syakinah, W. (2025). Pengaruh model keseimbangan umum terhadap distribusi kesejahteraan masyarakat di Indonesia. *CIRCULAR: Jurnal Pendidikan Sosial dan Ekonomi*, 3(1), 1–11.

- Mas-Colell, A., Whinston, M. D., & Green, J. R. (1995). *Microeconomic Theory*. New York: Oxford University Press.
- Miracantika, A. A. P. A., & Wirantari, I. D. A. P. (2024). Efektivitas program bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan (JIIP)*.
- Pareto, V. (1906). *Manual of Political Economy*. London: Macmillan.
- Salsabila, N., Muna, N., Pradana, V. H., & Nurcahya, W. F. (2024). Analisis efektivitas bantuan sosial (bansos) dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1–13.
- Stiglitz, J. E. (2000). *Economics of the Public Sector* (3rd ed.). New York: W.W. Norton & Company.